

FENOMENA PERJUDIAN BURUNG MERPATI DAERAH RUNGKUT TENGAH

Ahmad Nasrudin Fadli¹, Ridho Dwi Rahardjo²

Abstract

This study aims to offer solutions related to the prevalence of pigeon gambling in the Rungkut Tengah area of Surabaya. Through an empirical approach which is sourced from existing data in the field such as interviews and observations. Through this research, researchers offer a way out of the existence of pigeon gambling which is expressly prohibited in statutory regulations. By holding counseling and providing a forum such as an official competition to be able to channel hobbies in raising and caring for pigeons without having to participate in gambling. Law enforcement related to the prevalence of gambling cases that develop in the community certainly makes it difficult for the authorities to eradicate various gambling so that the law appears in line with existing norms. Through the efforts of the government and law enforcement officials, the making of regulations regarding the sanctions imposed by the practice of gambling does not make the public afraid of these threats. This is what makes it necessary to do something new related to efforts to eradicate pigeon gambling in Central Rungkut without having to stop the hobby of pigeon fans in the area, of course.

Keywords: gambling; pigeons; solutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi terkait maraknya perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah Surabaya. Melalui metode pendekatan secara empiris dimana bersumber dari data yang ada dilapangan seperti wawancara dan observasi. Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan jalan keluar dari adanya perjudian burung merpati yang secara tegas dilarang didalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengadakan penyuluhan serta memberikan wadah seperti perlombaan resmi untuk dapat menyalurkan hobi dalam memelihara serta merawat burung merpati tanpa harus mengikuti perjudian. Penegakan hukum terkait maraknya kasus perjudian yang berkembang dimasyarakat tentu membuat pihak aparat mengalami kesulitan dalam memberantas berbagai perjudian agar hukum terlihat sejalan dengan norma yang ada. Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman tersebut. Hal ini yang membuat perlu dilakukannya kebaruan terkait dengan upaya untuk memberantas perjudian burung merpati di Rungkut Tengah tanpa harus menghentikan hobi penggemar burung merpati di wilayah tersebut tentunya.

Kata kunci: merpati; perjudian; solusi

Pendahuluan

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, banyak sekali praktek-praktek perjudian yang sudah modern dengan berbagai macam mulai dari alat canggih hingga melalui situs jejaring sosial. Namun perjudian tradisional masih tetap memiliki pecintanya sendiri. Contohnya seperti togel, balap liar, sabung ayam, dan masih banyak lagi. Perjudian sendiri dinilai mampu untuk meningkatkan pendapatan seseorang secara instan. Dalam hal ini tentu perjudian juga memberikan dampak buruk atau resiko yang besar.³ Tentunya Pastiya asumsi publik mayoritas bila sikap hidup disuatu perkotaan metropolitan, sangat

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | ahmadnasrudinf@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | ridhodwi900@gmail.com.

³ Dapat diketahui bahwa perjudian merupakan taruhan yang disengaja, yaitu bertaruh pada suatu nilai atau sesuatu yang bernilai karena mereka sadar akan resiko yang diterim dan ekspektasinya. Tentu saja akan ada kejadian dalam setiap permainan, atau perjudian dengan hasil yang tidak ada atau tidak pasti. Kartono, 2009 Agung Septanto, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126-31 (p. 126).

berdampingan terhadap sikap yang menyimpang pada nilai-nilai budi pekerti. Semacam bermain judi, prostitusi, terhitung mengedarkan barang-barang terlarang dan lain sebagainya.⁴

Perjudian pada akhirnya secara sah atau sudah diatur dalam undang-undang untuk tidak boleh dilakukan, dan dianggap oleh pemerintah sebagai salah satu kejahatan. Yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian (UU No. 7-1974), dan kemudian Pasal 101 dan 541 KUHP PP menegaskan pelaksanaannya. 9 September 1981 dan Instruksi Kamtib Pangkop No. Ins 004/KPOKAM/IV/1971. Alasan pemerintah melakukan ini adalah perjudian dianggap merugikan aspek ekonomi dan moral bangsa.⁵

Perjudian burung merpati merupakan perjudian yang menggunakan burung sebagai ajang yang ditandingkan untuk mempertarungkan kecepatan terbang burung tersebut, tidak sedikit pula merpati yang ditandingkan agar mencapai di garis finish terlebih dahulu yang telah dipersiapkan. Di Surabaya, masyarakat sering melihat adanya kegiatan tersebut, judi merpati di Surabaya disebut dengan "adu doro". Kegiatan perjudian burung merpati semacam ini biasa dilangsung pada hari minggu diwaktu sore, bisa dipastikan kegiatan perjudian tersebut karena mereka setiap orang bisa memilih burung merpati yang terbaik sesuai pilihannya masing-masing dan mereka pertaruhkan uangnya. Jika pilihan merpati yang dipilih menang dalam pertempuran. Maka orang tersebut mendapatkan hasil uang taruhan.⁶ Seharusnya polisi memberantas tempat perjudian, namun nyatanya banyak tempat perjudian yang sering melakukan perjudian terkesan hanya dibiarkan bahkan pihak dari warga sekitar terkesan membiarkan perjudian tersebut dilakukan dan orang yang melakukan berjudi tidak mendapatkan hukuman. Seperti perjudian burung merpati di daerah Rungkut Tengah, Surabaya. Terdapat di beberapa gang yang menjadi titik kumpul orang-orang yang akan melakukan perjudian.

Selain itu, kegiatan ini juga membuat warga sekitar tempat perjudian merpati menjadi resah, secara umum para pemain merpati bukanlah masyarakat lokal, melainkan masyarakat baru atau dari kawasan lain yang datang. keadaan ini menjadi situasi ketentraman di sekitar kawasan menjadi mengkhawatirkan.⁷ Selain karena berjudi di burung merpati, hal ini menjadi hal yang dikhawatirkan bagi para orang tua. Jika ada anaknya yang terkena dampak dari perjudian tersebut, seperti disuruh melepaskan merpati atau menghias bekupon merpati dengan dibujuk dengan dikasih uang. Dalam ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk menghentikan atau menanggulangi penyebaran dan pemberantasan perjudian di kalangan terendah. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa di lapangan menunjukkan kalangan terendah semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi karena kalangan terendah melihat perjudian memiliki nilai positif pada diri mereka sendiri memandang atau mempersepsikan penjudi. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, karena sudah dianggap hal biasa di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah perjudian burung merpati yang sering dijumpai di daerah khususnya Rungkut Tengah, Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan bagaimana solusi yang

⁴ Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>.

⁵ Septanto.

⁶ Septanto.

⁷ Septanto.

tempat dan Tindakan tegas dari kepolisian, dikarenakan lomba burung merpati diperbolehkan. Namun lambat laun berujung pada proses perubahan, yaitu mengetahui kecepatan dan kelincahan burung dengan menggunakan taruhan uang sebagai media pertarungan merpati.

Perbandingan perbedaan penelitian pertama Mengenai judi merpati yang menyimpang dalam masyarakat, dimana dapat dijelaskan bahwa judi merpati merupakan kegiatan yang lumrah sebab warga sekitar menganggap judi merpati sebagai salah satu bentuk hiburan. Meskipun demikian pihaknya meyakini bahwa judi merpati merupakan masalah tersendiri dikarenakan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan sekitar perjudian burung merpati. Awalnya itu hanya permainan balap kecantikan terbang, tetapi secara bertahap menyebabkan proses perubahan penggunaan dana taruhan. Permasalahan yang timbul dari adanya judi merpati di masyarakat selain meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga dan sosial, kehadiran judi merpati di kalangan masyarakat, adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur, masyarakat melakukan karena keinginan mendapatkan keuntungan secara instan.⁸ Penelitian kedua ini membahas mengenai analisis dari mazhab agama islam dimana dalam teknis perlombaan burung merpati yang dilombakan, cara-cara yang dilakukan balap merpati tersebut tidak melanggar aturan-aturan dalam perlombaan. Namun jika suatu perlombaan ada taruhannya maka tidak diperbolehkan dan kegiatan ini termasuk dalam kegiatan judi.⁹ Penelitian ketiga mengenai hukum islam terhadap perlombaan burung merpati, perlombaan dimana awal mulanya dimainkan sebagian orang yang menyukai burung merpati untuk mengisi waktu kosong akan tetapi lama-kelamaan menjadi suatu perlombaan yang kategorikan dalam perjudian. Karena dalam perlombaan ini, kepada mereka yang memenangkan perlombaan itu bakal menerima hadiah dari pihak yang kalah dalam perlombaan dan mendapatkan uang taruhan yang sifatnya hanya mengandalan keberuntungan. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.¹⁰ Dengan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibuat saat ini. Dengan berdasarkan beberapa penelitian tersebut yang masih relevan temanya dengan penelitian ini. Maka penulis merumuskan satu rumusan masalah terkait kebijakan apa yang perlu diambil oleh warga maupun aparat hukum setempat untuk mencegah perjudian burung merpati di kampung-kampung daerah Rungkut Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian empiris dan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan hasil observasi sebagai sumber data utama.¹¹ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang

⁸ Septanto.

⁹ Universitas Mukarromah, Islam and others, 'KABUPATEN BANGKALAN (ANALISIS IMAM ASY-SYAFI ' I DAN IMAM MALIK)', 2019.

¹⁰ Gunawan, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LOMBA BALAP BURUNG DARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TALANG KELAPA', *Jurnal Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah, Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 8.5 (2019), 55.

¹¹ Tomy Michael, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.3-1764/jmm.v2i1.1336>>.

senantiasa berinteraksi dengan aspek-aspek masyarakat dan terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat warga yang sering kali melakukan perjudian burung dara, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum Kasus Perjudian Merpati Wilayah Rungkut Tengah

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut KBBI sendiri merupakan permainan yang menggunakan uang sebagai hadiah utama taruhan. Berjudi yakni menyerahkan beberapa sebagian uang ataupun harta dalam permainan menebak yang bersumber pada keberuntungan, bertujuan untuk memperoleh pundi-pundi uang ataupun harta yang lebih banyak dari jumlah uang maupun hartanya yang sebenarnya miliki. Perjudian merupakan sesuatu permainan yang pemainnya bertaruhan buat memilah satu opsi diantara sebagian opsi, dalam opsi tersebut cuma satu opsi saja yang benar serta jadi pemenang. Pemain yang kalah saat taruhan hendak membagikan taruhannya kepada pihak yang menang. Peraturan serta jumlah taruhan ditetapkan saat sebelum pertandingan diawali.¹² Yang berarti nantinya pemenang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah dalam bentuk hadiah, baik uang tunai yang diberikan kepadanya maupun harta sesuai dengan janji permainan yang dijanjikan.¹³

Reaksi masyarakat yang cenderung memiliki sifat "distance" atau bisa dibilang "menjauhi" sebenarnya dapat menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum bagi tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu. Sebaliknya respon warga yang memiliki sifat "closeness" malah menjadi aspek penunjang untuk tercapainya penanggulangan kejahatan secara terpadu.¹⁴ Berbagai kasus yang menggambarkan sulitnya penegakan hukum dalam mencari cara agar hukum sesuai dengan norma sosial, penegakan hukum merupakan pekerjaan dari polri atau biasa disebut polisi. sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi sebagai penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan, melindungi masyarakat dan mendorong masyarakat menjadi lebih baik lagi.¹⁵

Bagaimanapun, judi baik itu menguntungkan atau merugikan, sebagai juga bermanfaat, dan tidak dapat dipisahkan dengan perilaku dalam kehidupan bersosial. Bermain Judi merupakan salah satu konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara mental maupun fisik, dalam masyarakat yang penuh persaingan, krisis dan tekanan. Indonesia pada tahun 1974 perjudi ditetapkan sebagai perilaku yang dianggap melanggar

¹² Hendri Saputra Manalu, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.2 (2019), 430–31.

¹³ Imam Rofiqi and others, 'Jurnal Jendela Hukum', 7.1 (2020), 17.

¹⁴ Faktor lainnya merupakan kelemahan aparat hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten, tetapi otoritas hukum perlu diperkuat karena masyarakat semakin tidak nyaman dengan penegakan hukum yang diatur di Indonesia. Tidak sedikit publik mengungkapkan keprihatinan dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Tina Asmarawati, 'Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), p. 52 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>>.

¹⁵ Pelaksanaan hukum di masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ada beberapa aparat yang melakukannya. tidak menjalankan pernyataan hukum dengan benar. Widayati, 'Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis', *Hukum Rasendental*, 1.1 (2018), 511–23 (p. 511).

norma agama dan norma kesusilaan. Tetapi dapat mengancam negara. Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dengan ancaman dalam KUHP lama (Pasal 542) dengan hukuman kurungan satu bulan, oleh UU No. 7-1974 dinaikkan menjadi yang tertera di dalam Pasal 303 KUHP sekarang.

Rumusan mengenai kebijakan formulasi pada penganggulangan perbuatan perjudian terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 7-1974 mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Fockema Andrea yang berkata “Hazardspel (Kansspel) adalah permainan judi, permainan yang mengandalkan keberuntungan. Permainan itu dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang perjudian mengatur: Permainan yang mungkin menang secara umum tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain. Jika probabilitas meningkat, itu karena pemain lebih pintar atau lebih dapat diandalkan. Penegakan hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di Indonesia banyak menyita respons dikalangan masyarakat terkait sulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana. Dalam menangani tindak pidana perjudian pemerintah memiliki peran yang sangat penting, dalam hal nya penegakan hukum yang telah diterapkan pemerintah dalam Rumusan dan Ketetapan ketentuan hukuman pidana Undang-Undang diatur pada Pasal 303 dan 303 bis, dimana kedua pasal ini merupakan kejahatan. Perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 303 bis KUHP sama Pasal 542 KUHP pada mulanya merupakan pelanggaran dengan Ancaman pidana pada ayat (1) adalah pidana penjara paling lama satu bulan atau Denda maksimum adalah tiga ratus rupiah. Ketentuan pasal sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang telah mengancam criminal Kejahatan perjudian akan dihukum penjara Atau baik-baik saja. Hukuman maksimal 10 tahun (sepuluh tahun) Denda maksimal yang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah Indonesia.

Tujuan pemidanaan adalah suatu hal penting dalam penerepan pidana apapun bentuknya, Namun pada kenyataannya kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat dalam pandangan yang yuridis sistematis ialah hakim selalu meredusir peristiwa yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant sajadan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dapat dipidana jika tindak pidananya terbukti. Pertimbangan - pertimbangan tertentu dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menentukan jenis pidananya dan jumlah pidananya.

Seseorang untuk dapat melakukan tindak kriminalisasi suatu perbuatan kebanyakan dilaksanakan melalui suatu proses yang diawali dengan menggunakan penetapan suatu perbuatan yang dilaksanakan bagi seseorang atau dipersamakan memakai orang, yang oleh undang-undang dikatakan menjadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta diancam memakai sanksi. Proses ini berakhir memakai terbentuknya undang-undang yang mana perbuatan diancam menggunakan suatu sanksi berupa pidana. kitab undang-undang

hukum pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*). Namun disini peneliti menemukan fakta berdasarkan wawancara bahwa penegakan melalui pemidanaan berdasarkan pasal-pasal yang dapat dikenakan baik dalam KUHP dan diluar KUHP bukan merupakan langkah yang tepat untuk menghentikan prakter perjudian di wilayah Rungkut Tengah.



Foto 1
Wawancara dengan mantan pelaku perjudian Merpati

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan awal, mengatakan bahwa “penegakan hukum tidak selalu mengenai sanksi atau hukuman penjara untuk membuat efek jera bagi pelaku perjudian, melainkan harus dilakukan rehabilitasi supaya tidak kecanduan dalam kegiatan perjudian dan sadar apa yang dia lakukan adalah salah, orang yang melakukan perjudian karena kebanyakan faktor ekonomi, dan hobi yang menjadi salah karena taruhan”.

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan.¹⁶ Muladi menyatakan bahwa penegakan aturan pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan asa untuk bisa menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini lumrah karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan “perkara kemanusiaan” dan “perkara sosial” yang tidak bisa diatasi semata-mata dengan aturan pidana menjadi suatu perkara sosial, kejahatan adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.¹⁷

Faktor-faktor yang pengaruhi sikap berjudi, kalau berjudi mempunyai banyak dampak samping yang merugikan untuk pelaksana judi ataupun keluarganya bisa jadi telah sangat banyak disadari oleh para pelaku judi. Anehnya senantiasa saja mereka jadi susah buat meninggalkan sikap berjudi bila telah terlanjur mencobanya. Dari bermacam hasil penelitian

¹⁶ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 113 (n. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaar feit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit.) <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>>.

¹⁷ Progran Legislasi and Nasional Tahun, ‘Progran Legislasi Nasional Tahun 2005 - 2025 65’, 2019, 65-167 (p. 70).

lintas budaya yang sudah dicoba para pakar diperoleh sebagian aspek yang amat mempengaruhi dalam membagikan kontribusi pada sikap berjudi.¹⁸

Ditambah dengan Aspek keadaan keluarga yang menunjang meliputi ketidak harmonisan dalam keluarga, kondisi sarana dirumah yang kurang membuat anak muda mencari kompensasi diluar rumah dengan berkumpul dengan sahabat sebaya buat melaksanakan kegiatan yang dikategorikan selaku kenakalan anak muda. Perihal tersebut cocok dengan komentar Santrock (2013) yang berkata kalau kenakalan anak muda bisa terjalin sebab salah satunya dalah aspek keluarga sebab minimnya atensi dari orang tua ataupun keluarga terhadap pembelajaran serta pergaulan anak. Pola asuh serta pembelajaran yang diberikan serta diterapkan oleh keluarga hendak direspon oleh anak dengan reaksi yang berbagai macam tentunya.¹⁹

Upaya Meminimalisir Praktek Perjudian Merpati Wilayah Rungkut Tengah

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya menginjak pada masa dimana menemui kendala berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Berbagai kejadian menerangkan sulitnya pembangunan hukum serta mengejar hukum agar hukum nampak berjalan berdampingan dengan norma yang ada di masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah mengatur bagaimana cara untuk menekan berbagai macam jenis perjudian melalui pertaturan perundang-undangan. Perbuatan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan sebagai suatu bentuk usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk Undang-Undang diatur dalam Pasal 303 KUHP.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP ataupun yang diatur di luar KUHP semacam UU No. 7-1974Perjudian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP No. 9-1981) menetapkan kalau perjudian itu selaku kejahatan sehingga praktiknya butuh buat diberantas agar tidak terjadi lagi. Dengan demikian butuh diadakannya upaya-upaya buat mengatasi perjudian, diawali dari area yang kecil semacam di area desa, karena percuma saja apabila kita berupaya membasmi aksi perjudian langsung di area ataupun di kelas yang besar sebaliknya di lingkungan-lingkungan ataupun kelas-kelas kecil masih menggila. Pencegahan praktek perjudi yang dilakukan secara terselubung melalui Pendidikan Agama Islam juga dapat dilakukan dengan upaya menggiatkan penyadaran melalui *tazkiyatun nafs* yang menyentuh langsung pada aspek emosional mahasiswa sebagai peserta didik.²⁰

Penanggulangan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana namun tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun menciptakan suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak gampang, karena terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai

¹⁸ Reza Suharya, 'FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA', 7.3 (2019), 333.

¹⁹ Een, Umbu Tagela, and Sapto Irawan, 'Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4.1 (2020), 119-30 (p. 128).

²⁰ khotimatus sangadah, 'No PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 64.

dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesesuaian dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Di sini peneliti memberikan upaya untuk dapat menuntaskan permasalahan perjudian burung merpati yang sulit sekali untuk diberantas didalam wilayah perkampungan tanpa harus menghilangkan hobi warga terhadap burung merpati. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti tentang penegakan hukum positif dalam perjudian yang dinilai masih kurang, hal ini dikarenakan adanya masyarakat sekitar yang kurang berani untuk melaporkan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas burung merpati baik dari segi kecantikan bulu serta kecepatan itu sendiri dan kebanyakan dilandasi oleh hobi yang kemudian disalahgunakan. Pada akhirnya peneliti berusaha untuk memberikan masukan agar praktek perjudian ini bisa diganti dengan ajang perlombaan. Selain dapat menghentikan judi merpati perlombaan tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan kampung diwilayah Rungkut Tengah khususnya dan diharapkan dapat menjadi pelopor untuk menuntaskan kasus perjudian yang serupa diwilayah lainnya.

Melalui upaya pemerintah serta aparat penegak hukum dengan dibuatnya aturan mengenai sanksi yang ditimbulkan oleh praktek perjudian tersebut tidak membuat masyarakat takut akan ancaman yang ada dalam isi aturan yang ada. Contohnya seperti yang terjadi di wilayah Rungkut Tengah Surabaya, yang mana hingga saat ini masih ada kelompok warga yang tetap melakukan perjudian menggunakan burung merpati sebagai alat perjudiannya. Karena praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan warga sekitar perkampungan.



Foto 2
Wawancara Dengan Pemuda Di Perkampungan Rungkut Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua, sebagai warga sekitar wilayah perjudian burung merpati. Menyatakan bahwa perjudian dirungkut tengah bisa dibilang cukup meresahkan dikarenakan membuat kerumunan yang membuat jalanan perkampungan yang relatif sempit membuat semakin macet dan kadang melakukan teriakan yang membuat warga sekitar terganggu.

Ditambah dengan warga sekitar tidak pernah melakukan peneguran sebagai upaya untuk meminimalisir perjudian merpati dikarenakan, adanya rasa tidak menyinggung dan ditakutkan akan menimbulkan masalah secara pribadi. Melalui hasil wawancara ini masyarakat tidak mampu untuk melakukan upaya pencegahan perjudian tersebut karena takut menyinggung tetangga sendiri sebagai pelaku praktek perjudian merpati. Disini tentu diperlukan adanya penyuluhan dan melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjudian burung merpati di Wilayah Rungkut Tengah dengan melibatkan pengurus RT dan Aparat untuk dapat mengenai bagaimana upaya untuk menghentikan praktek perjudian tersebut. Sebagaimana desakan masyarakat atas upaya penanggulangan perjudian adalah mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah memberantas perjudian yang sudah ada di

masyarakat dengan melaporkan tindak pidana perjudian kepada pihak berwenang yang mengganggu masyarakat dan merugikan. Serta dengan pendirian pos keamanan di Wilayah Rungkut Tengah.

Dalam penanggulangan perjudian dibutuhkan upaya preventif serta pula upaya represif. Upaya preventif tersebut dicoba dengan metode membagikan motivasi serta tutorial kepada warga tentang akibat dari perjudian sehingga seluruh masyarakat sanggup menyadari kalau perjudian itu tidak boleh dicoba ataupun perjudian tersebut ialah sesuatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Tujuan upaya preventif merupakan selaku perlindungan warga dari perjudian dengan melaksanakan aksi penangkalan tersebut.²¹ Upaya represif dilaksanakan dengan tujuan memberantas kasus dengan mengoptimalkan dampak jera untuk pelaku lewat penegakan hukum.²² Tetapi jumlah pidana yang dilakukan diproses secara hukum lebih sedikit dibanding dengan jumlah permasalahan yang sesungguhnya. Perihal ini diakibatkan sebab keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan penegakan hukum.

Dari hasil dilapangan selain upaya yang sudah disebutkan diatas, yang harus dilakukan untuk meminimalisir perjudian burung merpati di wilayah Rungkut Tengah sendiri, selain aturan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Upaya meminimalisir perjudian burung merpati bisa diadakannya suatu perlombaan diwilayah tersebut yang melibatkan warga Rungkut Tengah sebagai penyelenggaraan perlombaan dan peserta bisa dari mana wilayah mana saja namun dikhususkan untuk warga Rungkut Tengah yang pecinta Burung Merpati, hadiah yang akan diberikan merupakan sebagian hasil tiket pendaftaran dan tiket penonton. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya memberikan kepada masyarakat kekuatan atau daya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemberdayaan masyarakat bertumpu pada keterampilan, prakarsa dan partisipasi masyarakat desa untuk mencapai perubahan.²³

Namun penyelenggaraan tersebut harus ada surat izin keramaian dari pihak berwajib, mengapa harus diadakan perlombaan. Karena sebageian besar orang melakukan perjudian burung merpati pada awalnya hanyalah hobi memelihara burung namun lama kelamaan menjadi sebuah perjudian, kebanyakan dari mereka yang melakukan perjudian adalah

²¹ I Komang Agus and others, 'TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid . B / 2018 / PN Dps)', 9.7 (2020), n. Dalam Metode Ini Yang Dimaksudkan Merupakan Gimana Cara-Cara Menghindari Munculnya Fasilitas Perjudian Saat sebelum Perjudian Itu Sendiri Terjalin. Pengawasan Dalam Perihal Ini Dimaksudkan Merupakan Sesuatu Control Untuk Dapat Menghentikan Munculnya Ataupun Menjalarkan Perjudian tersebut Dalam Sesuatu Area Kehidupan Sosial Yang telah Mapan. Semacam Halnya Dalam Dunia Medis, Kita kerap Disarankan Buat Menghindari Munculnya Penyakit Dari Pada Mengobatinya.

²² Putu Trisna, 'PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) * Oleh : Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Latar Belakang Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Sekarang Ini Begitu Pesat Terutama Pada', n. Upaya Represif Adalah Upaya Yang Dilakukan Setelah Terjadinya Kejahatan, Perindakan Atau Upaya Hukum. Upaya Represif Yang Dilakukan Adalah Dengan Melalui Penyelidikan, Penangkapan, Penyidikan, Hingga Sampai Pada Peradilan Yang Kemudian Diputuskan Oleh Hak.

²³ Kiki Endah, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 140.

kalangan pendatang. Mereka sebenarnya mengetahui perjudian merupakan tindak pidana namun mereka menghiraukan karena hobi memelihara burung merpati yang disalah artikan yang menjerumus ke perjudian demi mendapatkan uang.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia sejak tahun 1974, perjudian dianggap sebagai perbuatan yang bukan cuma melanggar norma agama serta norma kesusilaan, tetapi pula dapat membahayakan suatu negeri. Pada akhirnya pemerintah berupaya membuat UU No. 7-1974. Dengan ancaman dalam KUHP lama (Pasal 542) dengan hukuman kurungan satu bulan, oleh UU No. 7-1974 diangkat jadi yang tertera di dalam Pasal 303 KUHP yang saat ini. Selaku upaya buat mengatasi perjudian yang terus menjadi gempar.

Daftar Pustaka

- Agus, I Komang, Dany Parmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid . B / 2018 / PN Dps)', 9.7 (2020)
- Asiawan, Gede Indra Yasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kota Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), 113 <<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2141.109-114>>
- Asmarawati, Tina, 'Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8951>>
- Een, Umbu Tagela, and Supto Irawan, 'Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4.1 (2020), 119-30
- Endah, Kiki, 'Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2020), 140
- Gunawan, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LOMBA BALAP BURUNG DARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TALANG KELAPA', *Jurnal Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah, Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 8.5 (2019), 55
- Kleden, Kristoforus Laga, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 68 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>>
- Legislasi, Progran, and Nasional Tahun, 'Progran Legislasi Nasional Tahun 2005 - 2025 65', 2019, 65-167
- Manalu, Hendri Saputra, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2.2 (2019), 430-31
- Michael, Tomy, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>
- Mukarromah, Islam, Universitas, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Publik Islam, Progam Studi, and Perbandingan Mazhab, 'KABUPATEN BANGKALAN (ANALISIS IMAM ASY- SYAFI ' I DAN IMAM MALIK)', 2019
- Rofiqi, Imam, Miftahol Fajar Sodiq, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Mahasiswa Fakultas, and Hukum Universitas, 'Jurnal Jendela Hukum', 7.1 (2020), 17
- sangadah, khotimatus, 'No PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 2
Agustus 2021
Ahmad Nasrudin Fadli
Ridho Dwi Rahardjo

- JUDI TERSELUBUNG PADA MAHASISWA', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 64
- Septanto, Agung, 'Perilaku Menyimpang Masyarakat Penjudi Merpati Di Surabaya Deviant Behaviour of Pigeon Gamblers in Surabaya', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 7, 2019, 126-31
- Suharya, Reza, 'FENOMENA PERJUDIAN DIKALANGAN REMAJA', 7.3 (2019), 333
- Trisna, Putu, 'PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) * Oleh: Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Latar Belakang Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Sekarang Ini Begitu Pesat Terutama Pada'
- Widayati, 'Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis', *Hukum Rasendental*, 1.I (2018), 511-23